

Deklarasi Istiqlal dan *Reinforcement* Dialog Inter-religius di Indonesia

Donatus Doni Koli*

Kantor Kementerian Agama, Sumba Tengah, Indonesia

Abstrak

Penulis koresponden

Nama : Donatus Doni Koli
Surel : donikoli0597@gmail.com

Manuscript's History

Submit : Agustus 2024
Revisi : September 2024
Diterima : Oktober 2024
Terbit : November 2024

Kata-kata kunci:

Kata kunci 1 Deklarasi istiqlal
Kata kunci 2 Dialog
Kata kunci 3 Inter-religius

Copyright © 2024 STP- IPI Malang

Pada 5 September 2024, di Masjid Istiqlal, berlangsung peristiwa bersejarah yang disaksikan oleh para pemimpin dan tokoh multiagama, di mana Pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nassarudin Umar, menandatangani Deklarasi Bersama Istiqlal. Dokumen ini menjadi simbol kuat komitmen lintas agama dalam memperkuat dialog, membangun perdamaian, serta meneguhkan peran agama dalam menjawab isu sosial-kemanusiaan di Indonesia. Karya tulis ini mengkaji makna dan implikasi deklarasi tersebut sebagai fondasi bagi penguatan dialog inter-religius, yang tidak hanya sebatas wacana, tetapi juga mendorong kerja sama konkret dalam membangun masyarakat harmonis dan inklusif. Dengan menganalisis isi deklarasi serta konteks sosialnya, tulisan ini menunjukkan bahwa peran agama yang aktif dalam menjawab tantangan zaman dapat memperkuat sinergi antarumat beragama. Deklarasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi inisiatif dialog dan aksi nyata demi menciptakan kehidupan yang lebih damai dan berkeadilan.

Abstract

On September 5, 2024, at Istiqlal Mosque, a historic event took place, witnessed by religious leaders and interfaith figures, where the leader of the Catholic Church, Pope Francis, and the Grand Imam of Istiqlal Mosque, Nassarudin Umar, signed the Istiqlal Joint Declaration. This document serves as a strong symbol of interfaith commitment to strengthening dialogue, fostering peace, and affirming the role of religion in addressing social and humanitarian issues in Indonesia. This paper examines the meaning and implications of the declaration as a foundation for enhancing inter-religious dialogue, not merely as discourse but as a driving force for concrete collaboration in building a harmonious and inclusive society. By analyzing the content of the declaration and its social context, this study demonstrates that an active religious role in responding to contemporary challenges can strengthen synergy among religious communities. The declaration is expected to inspire dialogue initiatives and concrete actions to create a more peaceful and just society.

Corresponding Author

Name : Donatus Doni Koli
E-mail : donikoli0597@gmail.com

Manuscript's History

Submit : August 2024
Revision : September 2024
Accepted : October 2024
Published : November 2024

Keywords:

Keyword 1 Declaration of Istiqlal
Keyword 2 Dialogue
Keyword 3 Inter-religious

Copyright © 2024 STP- IPI Malang

Pendahuluan

Visitasi Apostolik Paus Fransiskus di Indonesia pada tanggal 4–6 September 2024 telah meninggalkan beberapa memoria enigmatis yang inspiratif. Kesan pertama yang muncul adalah profil kesederhanaan Paus yang amat kontras dengan perangai elitisme. Berangkat dari Roma ke Jakarta, alih-alih menggunakan jet pribadi Paus memilih duduk di kursi penumpang pesawat komersil bersama rombongan lainnya. Setibanya di Jakarta, Paus menolak naik mobil mewah anti-peluru dan tidak menginap di hotel berbintang lima. Selain itu, tindakan Sri Paus seperti menurunkan jendela untuk melambaikan tangan sepanjang jalan, memberkati anak-anak di jalan raya hingga bersalaman dengan pelbagai lapisan masyarakat adalah bukti otentik spirit ugahari Paus sebagai Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sejagat.

Selain itu, narasi inspiratif yang patut diangkat adalah kebiasaan Paus Fransiskus yang gemar membangun dialog dengan tokoh agama mayoritas di negara-negara yang dikunjunginya. Selama lawatan apostoliknya, Paus Fransiskus berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal dan beraudiensi dengan pemimpin dan tokoh lintas agama. Kedatangan Paus menghembuskan asa bagi terwujudnya dialog dan toleransi antar-umat beragama. Hal ini tentunya relevan, khususnya sebagai model trajektori dialogis di Indonesia yang diwarnai multikulturalitas.

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis hendak mengelaborasi salah satu aspek terpenting audiensi Paus Fransiskus bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal yakni Deklarasi Bersama Istiqlal bertajuk Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan (Bdk. <https://istiqlal.or.id/blog/detail/penandatanganan-deklarasi-bersama-istiqlal-2024.html>, diakses pada 5 Oktober 2024). Deklarasi Istiqlal yang menyoroti dua diktum krisis kontemporer yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim bisa dilihat sebagai landasan tekstual-religius bagi kiprah agama-agama di Indonesia untuk berani menyentuh dan memiliki opsi keberpihakan pada soal-soal kemanusiaan (*option for humanity*) atau sebagaimana dibahasakan dalam bagian penutup Deklarasi Istiqlal “Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia dan dengan demikian menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia”

Deklarasi dan Penandatanganan Dokumen Istiqlal adalah dorongan kuat atau sebagaimana termuat dalam judul karya ilmiah ini, *reinforcement* bagi upaya-upaya dan bentuk-bentuk dialog inter-religius di Indonesia yang perlu diakui sebagai sebuah keniscayaan. Mengapa dikatakan sebagai sebuah keniscayaan? Ada beberapa alasan yang mendasari tesis ini: Pertama, Indonesia adalah negara yang multi kultur dengan pluralitas jamak, baik dari segi suku, bahasa, budaya, dan agama. Pluralitas ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola demi kemajuan bangsa; Kedua, bangsa Indonesia dibangun bukan berdasarkan doktrin agama tertentu, tetapi atas dasar konsensus lintas batas sebagaimana termuat dalam Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kendatipun bukan merupakan negara agama, peran agama-agama tidak dianggap sepi di Indonesia. Justru kehadiran dan kontribusi agama-agama senantiasa didorong dalam

pembangunan dan kemajuan bangsa. Ke-empat, konflik bernuansa identitas, khususnya agama yang masih cukup sering terjadi. Di tengah pluralitas agama seringkali timbul gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan konflik. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini, narasi-narasi miring seputar intoleransi, persekusi terhadap penganut agama tertentu, pelanggaran dan pembredelan rumah ibadah masih mewarnai ruang publik kehidupan bangsa Indonesia.

Konteks ke-Indonesiaan sebagaimana diungkapkan di atas meyakinkan penulis bahwa ikhtiar dan optimisme terhadap dialog inter-religius perlu semakin didorong dan dikontekstualisasikan ke dalam bentuk yang nyata. Tesis penulis tersebut akan diuraikan dalam keseluruhan karya ilmiah dengan sistematika penulisan serta kerangka berpikir sebagai berikut: Pertama, Pendahuluan yang berisi uraian terkait latar belakang penulisan karya ilmiah ini; Kedua, Ulasan Teoretis seputar konsep dan bentuk-bentuk dialog Inter-religius; Ketiga, Ulasan terkait historisitas dialogalitas dalam Gereja Katolik dan sedikit pembahasan terkait dialog Katolik-Islam; Ke-empat, Pembahasan terkait relevansi Deklarasi Bersama Istiqlal sebagai *reinforcement* dialog inter-religius di Indonesia; dan Kelima, Penutup berupa kesimpulan atas seluruh pembahasan karya tulis ilmiah ini.

Metode Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif dengan merujuk pada sumber-sumber dan kajian literatur sebagai acuan. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2016, h. 9), metode deskriptif-kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana analisis data bersifat kualitatif dan hasil yang diperoleh memberi penekanan pada konteks makna ketimbang generalisasi. Metode ini membantu penulis dalam melihat dan memahami dan menganalisis potensi dan aktus dialog inter-religius di Indonesia. Bertitik tolak dari konteks dialogalitas dalam khazanah Gereja Katolik serta momentum historis Penandatanganan Deklarasi Istiqlal, penulis akan mengelaborasi sekaligus menawarkan beberapa rekomendasi terkait lanskap dan relevansi dialog inter-religius di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dialog inter-religius

Secara etimologis kata dialog berasal dari bahasa Yunani “dia-logos” yang bermakna bicara antara dua pihak atau dwicara (Hendropuspito, 1983, h. 172). Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Antitesis kata dialog adalah monolog yang berarti berbicara dengan diri sendiri. Terkait dialog, Swidler (2000, h. 147) menuliskan bahwa:

Dialogue is conversation between two or more persons with differing views, the primary purposes of which for each participant is to learn from the other so that he or she can change and grow... Both participants will also want to share their understanding with their partners. We enter into dialogue, however, primarily so we can learn, change and grow on the other.

Menurut Swidler, dialog merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih dengan maksud memberikan pemahaman dan pengertian tentang ajaran dan kehidupan. Dialog adalah cara yang paling efektif bagi seseorang untuk belajar dari pengalaman orang lain dan memahami keberadaannya.

Mengacu pada konsep dialog di atas, dialog inter-religius dapat dimaknai sebagai percakapan atau komunikasi antara dua atau berbagai pihak, kalangan, tokoh atau penganut agama untuk mengungkapkan pandangan, pendapat mereka dengan jelas dan tepat, dan sebaliknya mereka juga mendengarkan pandangan dari mitra bicaranya dengan baik. Fadilah (2014, h. 6) mengungkapkan bahwa dialog inter-religius merupakan komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh simpati, sehingga setiap peserta dialog masing-masing berupaya untuk saling memahami posisi peserta dialog lain secara tepat. Dialog juga tidak dimaksudkan untuk mendramakan sinkretisme, anggapan bahwa semua agama itu sama saja, dan juga bukan untuk membangun polemik non-kompromis yang selalu menganggap bahwa agama yang berbeda itu tak akan bisa dipertemukan (Borrmans, 2003, h. 27). Pada hakikatnya dialog mencari pemahaman yang lebih baik atas diri orang lain. Dialog justru adalah proses pendalaman iman dan kesadaran religius seseorang.

Dalam karya tulis ini, penulis memilih istilah “inter-religius” sebagai konsep yang lebih universal serentak moderat ketimbang istilah *interfaith* yang lebih bersifat individual-subjektif dan istilah antar-agama yang bersifat institusional. Tujuan utama dialog inter-religius adalah untuk saling belajar dan mendengarkan pengalaman dan narasi keagamaan dari masing-masing peserta dialog, tidak berintensi komparatif atau membangun menara gading metapolitik teologis yang beranggapan bahwa agama tertentu dijustifikasi paling benar. Dialog inter-religius mensyaratkan sikap terbuka serentak paralelisme (Panikkar, 1994, h. 22-23), yaitu pemahaman dan sikap bahwa agama-agama berada dalam posisi sejajar, bukan dalam relasi dominan-subordinat atau skema *top-bottom*.

Swidler (op.cit., h. 174-177) mengemukakan beberapa prinsip-prinsip dialog, antara lain: (i) mempelajari perubahan dan perkembangan persepsi serta pengertian tentang realitas; (ii) harus menampilkan proyek dua pihak, baik dalam internal pemeluk agama, juga antar-masyarakat penganut agama; (iii) prinsip kejujuran dan ketulusan; (iv) dialog hanya bisa dilakukan di antara pihak-pihak yang setara; (v) dialog harus dilakukan dengan saling percaya (mutual trust); (vi) peserta dialog harus bersifat kritis, baik terhadap agama partner dialog maupun agamanya sendiri.

Model dan bentuk-bentuk dialog inter-religius

Dalam ranah dialog inter-religius secara umum diketahui beberapa model dan bentuk dialog inter-religius. Dalam karya tulis ini, penulis mengacu pada pendapat Hedges (2010) serta salah satu dokumen penting pasca konsili vatican II, *Dialogue and Mission* (h.28-35, bdk. Riyanto, 2010, h. 212-215).

Pertama, Dialog Kehidupan yang melibatkan banyak orang melalui interaksi keseharian. Dialog kehidupan juga disebut sebagai dialog kemanusiaan Dalam konteks

masyarakat yang ditandai kemajemukan, salah satu hal esensial adalah dialog satu dengan yang lain. Pengalaman manusiawi sehari-hari seperti kegembiraan, pesta dan kesusahan mendorong orang untuk tergerak membagikan pengalamannya. Dialog kehidupan tidak secara eksplisit menyentuh perspektif agama, tetapi lebih digerakkan oleh sikap-sikap solider dan kebersamaan yang melekat.

Kedua: Dialog Karya (untuk bekerja sama) atau Dialog Aksi yaitu dialog inter-religius yang memberi perhatian khusus pada penanganan isu-isu faktual yang sedang dihadapi bersama. Biasanya disebut juga sebagai dialog sekuler. Dialog karya dimaksudkan sebagai kerja sama yang lebih intens dan mendalam (depth) dengan para pengikut agama-agama lain. Dialog karya dapat dikatakan sebagai dialog yang memiliki bobot sedikit di atas dialog kehidupan. Sasaran yang hendak diraih jelas dan tegas, yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Bentuk dialog semacam ini dewasa ini kerap kali terjadi di dalam kerangka kerja sama organisasi-organisasi kemanusiaan di mana banyak orang dengan pelbagai latar belakang agama bekerja sama menghadapi masalah/isu di tengah masyarakat.

Ketiga: Dialog Pandangan Teologis yang biasanya diperankan para intelektual atau kalangan akademisi dengan tema atau topik teologis tertentu. Dialog teologis juga dikenal sebagai dialog diskursif. Sebenarnya dialog teologis tidak hanya dikhususkan untuk para ahli melainkan juga siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi karena menyangkut soal-soal teologis yang tidak jarang rumit, dialog semacam itu lebih cocok untuk para ahli. Dalam dialog teologis, orang diajak untuk menggumuli, memperdalam dan memperkaya warisan-warisan keagamaan masing-masing sekaligus untuk menerapkan pandangan-pandangan teologis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. Dialog teologis tidak boleh dimaksudkan untuk menyerang pandangan sesama rekan dialog. Dialog teologis meminta keterbukaan dari masing-masing pihak untuk menerima dan mengadakan perubahan-perubahan yang makin sesuai dengan nilai-nilai rohaninya.

Keempat, Dialog Pengalaman Keagamaan (sharing iman) yang mengedepankan sharing matra-matra keagamaan, seperti: pengalaman spiritualitas, mistisisme, maupun pengalaman batin tertentu. Dialog pengalaman keagamaan atau lebih baik disebut pengalaman iman, merupakan dialog tingkat tinggi. Dialog pengalaman iman dimaksudkan untuk saling memperkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing pribadi. Dalam dialog ini, pribadi-pribadi yang berakar dalam tradisi keagamaan masing-masing berbagai pengalaman doa, kontemplasi, meditasi, atau bahkan pengalaman iman dalam arti yang lebih mendalam.

Patut dipahami bahwa kendatipun beragam, model-model dialog tersebut saling berkelindan. Orang yang berdialog teologis dapat sekaligus berdialog kehidupan sebagai seorang sahabat, sekaligus berdialog tentang pengalaman keagamaannya, serta menyinggung persoalan-persoalan sosial yang dihadapi bersama.

Historitas dialog dalam khazanah Gereja Katolik

Berbicara seputar dialogalitas dalam khazanah Gereja Katolik sesungguhnya tak bisa dilepaspisahkan dari konteks historisitas dialog sebagai bagian dari pergumulan peziarahan Gereja Katolik. Sebagaimana diakui secara luas bahwa Konsili Vatikan II adalah titik tolak dialogalitas hidup Gereja. Kendatipun sikap dan orientasi dialog sudah termaktub dan mempunyai akar dalam kekayaan seluruh tradisi hidup Gereja, gema “*aggiornamento*” yang dikumandangkan Konsili Vatikan II menetapkan sikap positif serta dialog dengan agama-agama lain dalam bentuknya yang konkrit (Riyanto, 2010, h. 24).

Dalam karya tulis ini, penulis banyak merujuk pada tulisan Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM -seorang Imam Katolik, pengajar dan intelektual- yang secara komprehensif telah menguraikan kerangka konseptual dan dinamika historis dialog inter-religius dengan titik tolak pergumulan Gereja Katolik (Bdk. Riyanto, 2010).

Bertitik tolak dari lokus Gereja Perdana di mana misi Paulus dan para rasul lain yang mengedepankan penghargaan terhadap umat kepercayaan lain. Sikap dialogal para rasul ini diwariskan kepada para Bapa Gereja seperti Ireneus, Origenes, Hippolitus, dan Gregorius Nazianze. Tokoh lain yang juga mengutamakan sikap positif terhadap agama lain juga dapat ditemukan dalam sosok Fransiskus dari Asisi yang senantiasa mengedepankan perdamaian dalam diskusi dan hubungan dengan penganut agama lain.

Kemudian pada abad 16 dan 17, para misionaris Gereja yang bermisi dan berjumpa dengan agama dan kebudayaan lain juga mengambil sikap-sikap dialogal dan merangkul. Namun, bangkitnya kolonialisme dan invasi oleh bangsa Eropa pada bangsa-bangsa lain di masa itu sungguh menjadi tantangan besar bagi sikap positif dan misi dialogal Gereja. Kendatipun kolonialisasi dan penjajahan oleh bangsa Eropa bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, dampaknya terlihat pada karya pewartaan Injil saat itu yang berhadapan dengan pelbagai masalah keadilan dan pluralitas kebudayaan lain. Kolonialisme serta berkembang luasnya aliran sesat Yansenisme yang memperogandakan secara keliru *extra ecclesiam nulla salus* (di luar Gereja tidak ada keselamatan) menyebabkan Gereja didaulat sebagai institusi dan pengajar doktrin komprehensif yang eksklusif.

Namun demikian, ungkapan *extra ecclesiam nulla salus* sesungguhnya bersifat *apologetis* dan bukan eksklusif. *Apologetis* berarti pembelaan kebenaran iman melawan fallacy atau kesesatan dalam ranah internum Gereja. Sebagaimana diuraikan Viktorahadi (2021, h. 121), konteks awal pernyataan ini sesungguhnya bersifat eklesiologis. Artinya, pernyataan ini terarah pada upaya mengembalikan kawanan domba ke arah persatuan ke dalam Tubuh Mistik Kristus. Akan tetapi, proses berikutnya dengan aneka macam dinamika konteks yang berbeda membuat pernyataan itu seolah-olah bersifat eksklusif-apologetis yakni pembelaan diri Gereja secara radikal sekaligus subordinasi terhadap ajaran agama atau keyakinan di luarnya.

Namun, tendensi eksklusivisme *extra ecclesiam nulla salus* kemudian berkembang seiring dengan penyebarluasan semangat ideologis dalam gelombang kolonisasi serta konflik

dan pertentangan dengan aneka kebudayaan dan kepercayaan lain di luar Eropa. Misunderstanding ungkapan *extra ecclesiam nulla salus* ini berlangsung berabad-abad hingga Konsili Vatikan II.

Gema “*aggiornamento*” yang dikumandangkan Konsili Vatikan II mengafirmasi bentangan positif serta dialog dengan agama-agama lain dalam bentuknya yang konkrit. Konkretisasi yang dimaksud adalah sikap dialogal yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata dan tidak berhenti pada tataran konseptual semata.

Konsili Vatikan II secara lugas menegaskan sikap dialogalnya dengan membedakan tiga kelompok umat di luar Gereja Katolik: (i) *Other Christians* atau Kelompok Umat Kristen yang lain; (ii) *Non-Christians* atau Kelompok Umat bukan Kristen; dan (iii) *Non-Believers* atau Kelompok bukan umat beriman atau kaum ateis. Terhadap kelompok *other Christians* sikap dialogal Gereja Katolik diinisiasi dengan pendirian Sekretariat untuk Kesatuan Umat Kristen atau SPUC (*Secretariat for the Promotion of the Unity of Christians*) oleh Paus Yohanes XXIII pada Januari 1963. Dengan kelompok *non-Christians*, didirikan Sekretariat Umat bukan Kristen atau SNC (*Secretariat for Non-Christians*) pada 19 Mei 1964 oleh Paus Paulus VI. Sekretariat ini kemudian berganti nama menjadi Sekretariat atau Dewan Kepausan untuk Dialog Inter-religius atau PCID (*Pontifical Council for Interreligious Dialogue*). Sementara itu, berhadapan dengan kelompok orang tak beriman (*non-Believers*), Tahta Suci Vatikan mendirikan Sekretariat untuk dialog dengan kaum ateis atau SU (*Secretariat for Unbelievers*) pada bulan April 1965. Kemudian, oleh Paus Yohanes Paulus ke-II, SU disatukan dengan Dewan Kepausan untuk Kebudayaan yang bertujuan untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan siapa saja dari pelbagai lapisan kebudayaan (*ibid.*, h. 24-30).

Secara khusus dari ketiga kelompok di atas, perlu diuraikan hubungan antara Kekristenan (Katolik) dan Islam yang telah menorehkan catatan histori panjang nan penting. Kendatipun Kekristenan awal dan Islam berasal dari lokus historis Abrahamik yang sama (Feiler, 2002, h. 96) dan bentuk-bentuk interaksi keduanya telah berlangsung pada periode sebelumnya, barulah pada abad ke-20 ditandai dengan Konsili Vatikan II, timbul dorongan dan hasrat yang besar untuk berdialog dan mendapatkan bentuk-bentuk konkritnya (Goddard, 2013). Terkait hubungan Katolik-Islam, dalam dokumen *Nostra Aetate* diungkapkan demikian:

Gereja juga menghargai umat Islam, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia... Memang benar, di sepanjang zaman cukup sering telah timbul pertikaian dan permusuhan... Konsili suci mendorong mereka semua, supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang...(NA, terj. Hardawiryana, 1992, h. 26).

Dalam ranah ini, terang Konsili Vatikan II yang juga dikenal sebagai Konsili Ekumenis telah membuka cakrawala baru dalam hubungan di antara umat Katolik dengan umat Islam di mana terkandung penghargaan dan upaya dialogis untuk menjawab persoalan dunia.

Relevansi deklarasi istiqlal bagi reinforcement dialog inter-religius di Indonesia

Dalam rangkaian acara visitasi apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, tepatnya pada hari Kamis, 5 September 2024, berlangsung di Masjid Istiqlal -yang terhubung melalui “terowongan silaturahmi” dengan Gereja Katedral Sta. Maria Diangkat ke Surga-, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umbar disaksikan pemimpin dan tokoh lintas agama, menandatangani Dokumen “Deklarasi Bersama Istiqlal” bertajuk: Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan.

Pertama, Deklarasi Istiqlal menyoroti signifikansi peran agama-agama terhadap dua fenomen utama krisis global saat ini: dehumanisasi dan krisis lingkungan. Untuk konteks global, beberapa fakta lapangan antara lain masalah kerusakan lingkungan dan peningkatan suhu bumi, *double standard politic*, perang Ukraina-Rusia dan krisis kemanusiaan di Palestina. Untuk konteks lokal di Indonesia, ke-2 isu di atas dapat dilihat dalam konteks persoalan intoleransi agama, gejala kemanusiaan di Papua, korupsi, kemiskinan struktural, ekspansi industri ekstraktif serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan memicu dehumanisasi, dsb. Deklarasi Bersama Istiqlal berangkat dari kesadaran mendalam bahwa selama ini pembangunan dan produksi kemakmuran sosial seringkali juga memproduksi risiko dan kerusakan sosial yang tidak kecil.

Kedua, kolegialitas spirit agama yang menutrisi kemanusiaan dan falsafah Pancasila. Sungguh menarik bahwa Deklarasi Bersama Istiqlal tidak hanya menyoroti peran agama-agama di Indonesia tetapi juga menggarisbawahi falsafah dan dasar negara Indonesia, Pancasila. Semangat ini semakin menunjukkan kemungkinan positif bahwa agama dan negara dapat berjalan berdampingan. Kondisi ini tentu relevan dengan apa yang disebut Habermas (Terj. Cronin, 2008) sebagai ranah masyarakat pasca-sekular di mana negara tidak menganggap sepi peran agama-agama, tetapi justru mendorong dan memfasilitasi peran agama-agama guna menjawab soal-soal kemanusiaan. Deklarasi Istiqlal cocok dengan konteks ideologi politik NKRI sebagai negara demokrasi Pancasila karena tidak dibangun di atas fundamen teologi agamis ataupun ideologi sekuler murni.

Ke-tiga, “satu keluarga umat manusia” dan hormat terhadap martabat kemanusiaan. Sungguh menarik bahwa ke-3 seruan dalam Deklarasi Bersama Istiqlal menghembuskan fitrah etos global yang perlu dimiliki setiap agama dalam menjawab soal-soal kemanusiaan konkrit. Setiap agama perlu membangun dialog dan kerja sama dalam memerankan spirit pembebasan konkrit di tengah masyarakat yang ditandai penindasan dan ketidakadilan. Seruan ini dalam Gereja Katolik telah dikumandangkan Paus Fransiskus melalui beberapa ensiklik dan surat apostolik (antara lain: *Lumen Fidei* tentang peran iman dalam kehidupan manusia; *Laudato Si* tentang kepedulian terhadap masalah lingkungan dan krisis ekologi; dan *Fratelli Tutti* tentang persaudaraan dan solidaritas sosial). Di kancah internasional, komitmen yang senada dengan Deklarasi Istiqlal dapat dirujuk dalam momentum historis

penandatanganan Dokumen Abu Dhabi oleh Paus Fransiskus dan Tokoh Muslim Dunia, Sheikh Ahmad Al-Tayeb, Gran Syek (imam besar) Al Azhar, pada tanggal 4 Februari 2019 di Ibu Kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi (Cervenkova and Vizina, 2021, h. 62). Dokumen Abu Dhabi dapat disebut sebagai salah satu catatan historis terpenting di era modern yang menjadi tonggak sejarah dalam dialog antar-agama dan toleransi, khususnya antara umat Kristiani dan Muslim.

Terowongan persahabatan dan dialogalitas yang bertumbuh

Dalam pidato yang dibawakannya ketika beraudiensi dengan para tokoh dan pemimpin lintas agama, Paus Fransiskus dengan nada poetik mengangkat makna luhur dialogalitas di balik salah satu fragmen ikonik terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta:

“haruslah disebut terowongan bawah tanah, “terowongan persahabatan” yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berada “berhadapan” satu sama lain, tapi juga “terhubung” satu sama lain. Sungguh, lorong ini memungkinkan pertemuan, dialog, dan kemungkinan nyata untuk “menemukan dan membagikan “mistik” hidup bersama, berbaur dan bertemu...”, (Bdk. L'Osservatore Romano, 2024, h. 7).

Dialog inter-religius tidak dapat dipisahkan dari konteks keberagaman dan dinamika sosio-politik yang merupakan ranah relasi sehari-hari antar-umat pemeluk agama di Indonesia. Tidak dapat disangsikan bahwa ciri kemajemukan masyarakat serta panorama konflik identitas (berkedok agama) yang acapkali terjadi merupakan premis fundamental bagi relevansi dialog inter-religius di Indonesia. Dialog inter-religius bahkan tidak hanya sebatas proyek artifisial alternatif semata, tetapi sebuah keniscayaan dan dorongan imperatif dari dalam diri agama-agama di Indonesia.

Namun, perlu disadari bahwa bahwa dialog inter-religius tidak dimaknai per se sebagai sebuah pertemuan formal antar-pemimpin misalnya dalam audiensi atau silaturahmi tahunan. Persis formalisme dialogalitas inilah yang hendak dikoreksi dan dilampaui oleh para pemimpin dan tokoh agama yang terlibat dalam Deklarasi Istiqlal. Deklarasi Istiqlal dirumuskan dan dibangun berbasis penghormatan terhadap martabat kemanusiaan luhur, suasana kebebasan dan keanekaragaman. Relevansi Deklarasi Bersama Istiqlal justru hadir sebagai ikhtiar bagi perwujudan dialog inter-religius yang mampu mengatasi sekat-sekat formal regulatif dan kebijakan sosio-politik -yang patut diakui- sedikit banyak membonsai dan diskriminatif terhadap ekspresi dan eksistensi agama. Deklarasi Istiqlal berangkat dari universalitas nilai dan ajaran agama sebagai rahmat bagi semesta dan seluruh ciptaan yang terarah padan kehidupan yang manusiawi dan berkeadilan. Disposisi ini dirumuskan dengan sangat baik oleh Hans Küng (2008, h. 387 dalam Madung, 2011, h. 250), seorang Teolog Katolik berkebangsaan Swiss: “Kendatipun manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, satu hal tetap tak dapat dilakukan tanpa agama: memberikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas kewajiban-kewajiban moral”. Presuposisi

awal dan aspek universalitas-teleologis di balik imperatif untuk membangun dialog dan solidaritas global oleh agama-agama inilah yang ditekankan Deklarasi Istiqlal.

Deklarasi Bersama Istiqlal juga mengedepankan salah satu matra terpenting agama-agama di era modern yaitu religiusitas yang memiliki signifikansi sosial. Konteks nilai yang ke-2 ini menjadi penting tatkala di satu sisi, agama terlampau menitikberatkan struktur logis teologi dan nyaman di atas menara gading doktriner, sambil di sisi lain agama-agama dan pengikutnya seringkali tidak mencerminkan eksistensinya sebagai rahmat bagi seluruh semesta dan sebaliknya menjadi biang kekerasan. Dalam konteks wajah keagamaan di Indonesia, persoalan ini mengemuka ketika religiusitas masyarakatnya mengandung *contradictio in terminis* karena masih menyimpan beban-beban banalitas yang tak kecil seperti intoleransi, ekstrimisme dan kekerasan atas nama agama, klaim kebenaran tunggal, dsb. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu santer diberitakan seorang Aparatur Sipil Negara yang membubarkan ibadah Umat Kristen di Gresik, Jawa Timur.

Deklarasi Bersama Istiqlal mendorong agama-agama agar dalam suatu kolegialitas memerankan *mythopoetic* pembebasan melalui karya-karya sosial emansipatif atau sebagaimana isi deklarasi: “peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia.” Paus Fransiskus dan para pemimpin agama-agama sungguh sadar bahwa dialog inter-religius harus menghidupkan iman keagamaan dalam menunjang dan memberi daya pembebasan untuk membangun masyarakat yang dilandasi cinta dan persaudaraan. Justru, dalam pemaknaan yang lebih radikal, keadilan sosial dan solidaritas perlu menjadi *pelagus significatione theologicus* (makna utama teologi). Untuk sampai pada kondisi ideal tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam isi deklarasi: “agama-agama harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan *indifferentisme* yang melanda dunia.”

Sebagaimana telah ditunjukkan pada poin pertama di atas dan mengacu pada salah satu bentuk dialog inter-religius, dialogalitas yang tidak dipelintir formalisme harus berlanjut dalam dialog kehidupan dan menjiwai komunikasi serta relasi sehari-hari manusia Indonesia. Dialog kehidupan ini akan bermuara pada suatu spirit dan sikap pro-eksistensi di mana umat dan komunitas beragama bisa menerima, mengakui dan menghadirkan kebaikan bagi penganut agama lain. Untuk konteks Indonesia, aksentuasi pada dialog kehidupan dan ruh pro-eksistensi sesungguhnya bukanlah hal yang asing. Pertama-tama, masyarakat Indonesia memiliki falsafah dan ideologi bersama bernama Pancasila. Selain itu, nilai-nilai sosio-budaya seperti persaudaraan, gotong-royong, dan kekerabatan adalah warisan sejarah dan tertanam dalam setiap kebudayaan bangsa Indonesia. Konstruksi nilai-nilai tersebut menubuh dalam sebuah semboyan yang kita kenal sebagai Bhineka Tunggal Ika. Sejarah panjang perjuangan bangsa melawan penjajahan, dialektika heroik dalam proses perumusan Pancasila dan harta kekayaan rohani serta kebudayaan hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memantapkan kehidupan bersama yang damai dan berkeadilan.

Namun demikian, poin ke-3 ini seringkali menjadi *challenge* serius dalam implementasi dialog inter-religius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam komunitas internasional dan partikular lainnya. Aplikasi nilai-nilai dialog kehidupan hemat penulis dapat ditempuh dan diperkuat melalui penyiaran dan pengajaran oleh masing-masing agama serta peran pemerintah (khususnya melalui instansi Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang agama).

Pengajaran dan penyiaran agama hendaknya selaras zaman dan terarah pada sikap hormat dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan luhur. Sementara itu, dari sisi pemerintah diharapkan sikap akomodatif terhadap eksistensi dan dinamisme agama-agama sekaligus semakin memberi ruang bagi dialog antar-agama. Selama ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengusahakan banyak hal demi pertumbuhan serta relasi antar-umat beragama yang kondusif: baik dari segi regulasi, maupun arah kebijakan dan program-program nasional. Salah satu di antaranya adalah Program Prioritas Moderasi Beragama yang gencar digaungkan hingga saat ini. Peran dan aksentuasi pada program Moderasi Beragama hendaknya senantiasa dikampanyekan dan terlebih penting diaplikasikan secara strategis: semisal internalisasi muatan Moderasi Beragama dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah (tentu tetap disesuaikan dengan jenjang dan konteks pembelajaran), pengajaran oleh masing-masing agama-agama, optimalisasi program “Kampung Moderasi Beragama”, dsb.

Simpulan

Tugas dan upaya tindak-lanjut mewujudkan dialog inter-religius di Indonesia perlu senantiasa diperjuangkan. Sebagaimana diungkapkan dalam Deklarasi Bersama Istiqlal bahwa “keyakinan dan ritual agama-agama memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia”, optimisme bagi dialog inter-religius yang berdampak perlu lahir dari relung hati setiap pemimpin dan penganut agama di Indonesia. Dialogalitas di atas kertas dan di ruang-ruang silaturahmi harus menubuh menjadi dialog dan sikap hidup di jalanan, dalam ruang hidup dan relasi sehari-hari (daily life) manusia Indonesia. Sehingga, cita-cita nasional bahwa Indonesia dapat menjadi miniatur bagi dialog, toleransi dan persaudaraan antar-umat beragama dalam panorama keberagaman dapat menjadi mozaik-mozaik indah yang berarti bagi peradaban dan kemanusiaan di tingkat global.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Referensi

- Azra, Azumardy, (1999), *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Bormans, Maurice, (2003), *Pedoman Dialog Kristen-Muslim*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.

- Cervenkova, Denisa dan Vizina, Peter, (2021), "Faith Embodied in Attitudes: Ethics of Dialogue and Brotherhood of All People in the 'Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together' In Abu Dhabi and the Encyclical Fratelli Tutti", *Jurnal Theologica*, Vo. 11, No. 1.
- Dokumen Konsili Vatikan II, (1992), *Nostra Aetate*, terj. R. Hardawiryana, SJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Feiler, Bruce, (2002), *Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths*, William Morrow: New York.
- Goddard, Hugh, (2013), *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia*, Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta.
- Habermas, Juergen, (2008), *Between Naturalism and Religion*, terj. Ciaran Cronin, Cambridge: Polity Press.
- Hedges, P., (2010), *Controversies in Interreligious Dialogue and The Theology of Religions*, London: SCM Press.
- Hendropuspito, D., (1983), *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- <https://istiqlal.or.id/blog/detail/penandatanganan-deklarasi-bersama-istiqlal-2024.html>, diakses pada 5 Oktober 2024.
- Küng, Hans, (1991), *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, New York: Crossroad.
- Küng, Hans, (2008) "Leitlinien zum Weiterdenken", dalam Hans-Martin Schoenherr-Mann, *Miteinder Leben Lernen*, Muenchen: Piper Verlag, dalam Otto Gusti Madung, "Relasi Agama dan Moralitas Masyarakat Postsektuler Negara", *Jurnal Millah*, Vol. X, No. 2, Februari 2011.
- L'Osservatore Romano, (2024), *Weekly Edition in English*, Fifty-seventh year, Number 36, Friday, 6 September 2024.
- Riyanto, Armada, (2010), "Sebuah Studi tentang Dialog Inter-religius", *Jurnal Diskursus*, 9: 2, STFT Driyarkara.
- Riyanto, Armada, (2010), *Dialog Interreligius: Historisitas*, Tesis, Pergumulan, Wajah, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Cet. ke-V.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Swidler, Leonard and Paul Mojzes, (2000), *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Philadelphia: Temple University Press.
- Viktorahadi, R. F. Bhanu, (2021), *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus: Dinamika Gagasan Inklusif Gereja dari Abad II sampai Konsili Vatikan II*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

